TERAS UTAMA

Sambungan dari hal. 1

Jokowi, Prabowo dan Minang

DUKUNGAN 10 bupati dan wali kota se-Sumbar terhadap pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu menarik perhatian



Israr Iskandar Dosen Sejarah FIB Unand

banyak kalangan. Dukungan lebih dari separuh kepala daerah kepada petahana itu menambah ingar bingar politik setidaknya di Sumbar menjelang Pilpres 2019.

Kesepuluh kepala daerah itu adalah Bupati Solok Gusmal, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati

Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Mentawai Yudas, Wali Kota Sələk Zul Elfian dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

→ Baca Jokowi...Hal 7

rena alasan idiologis, tetapi juga karena banyak tokoh utamanya dari Minang.

Namun pasca-Demokrasi Terpimpin, kecenderungan orang Minang justru ke "partai tengah" yang "non-idiologis". Tidak heran, Golkar selalu berjaya, tidak hanya di masa Orde Baru (1966-1998), tetapi juga sampai reformasi (1999-sekarang). Belakangan diikuti pula Partai Demokrat dan Gerindra. Partai-partai berbasis massa Islam seperti PAN dan bahkan partai Islamis, seperti PPP, juga memperoleh suara signifikan di daerah ini, tetapi dua partai ini sebenarnya juga sudah bergerak ke "tengah".

Dengan demikian, Sum-

bar dalam rentangan sejarah modernnya memang bukan "rumah" bagi partai-partai (meminjam istilah Indonesianis Herbert Feith) "nasionalis radikal", seperti PNI, maupun "nasionalisme ra-dikal plus" (plus unsur non-Muslim) seperti PDI dah PDIP. Secara ketokohan, Sumbar dengan demikian juga bukanlah basis bagi politik vang mengikut figur besar na ionalis radikal, khususnya Soekarno.

Kekalahan Jokowi di Sumbar dalam Pilpres 2014 karena ia dianggap scorang tokoh dalam satu garis kontinum dengan kaum nasionalis ra-

anggap representasi spekrum politik model "Orde Lama" (Demokrasi Terpimpin) yang notabene tidak akomodatif terhadap Minang dan juga Islam. Sejarah mencatat, era Demokrasi Terpimpin adalah zaman "kejayaan" Soekarno dan masa-masa komunis "naik daun", namun sebaliknya menjadi periode "kelam" bagi sejarah puak Minang pasca penumpasan PRRI plus Masyumi/PSI.

Di pihaklain, keunggulan Prabowo di Sumbar karena ia dinilai sebagai representasi spektrum politik model "Orde Baru" vis-a-vis "Orde Lama" tadi. Dalam konteks ini, sebagian generasi senior Minang mungkin mengingat, Orde Baru dengan watak antikomunisnya cukup akomodatif terhadap etnik ini dan bahkan menjadi masa-masa kebangkitan bagi Sumbar. Tak hanya itu, Prabowo juga (dalam batas tertentu) kemudian dianggap mewakili spektrum politik "Islam" vis-u-vis "nasionalis radikal/sekuler".

Masalahnya kemudian, persepsi-persepsi politik semacam itu sering dipengaruhi secara masif oleh kampanye hitam yang bahkan menyasar pemilih baru yang aktif di media sosial. Inilah tantangan serius demokrasi kita, termasuk Pilpres 2019, di mana akan lebih banyak lagi

Bagaimana memaknai dukungan para bupati dan wali kota itu? Apakah pernyataan dukungan tokoh-tokoh formal tersebut linear dengan hasil Pilpres nanti? Tentu saja tidak ada jawaban serba pasti. Sewaktu Pilpres lalu, 95 persen bupati dan wali kota di Sumbar mendukung Prabowo-Hatta Radjasa, bahkan Gubernur Irwan Prayitno menjadi Ketua Tim Pemenangan, tetapi perolehan suaranya di bawah itu, yakni di kisaran 77 persen.

Namun demikian, deklarasi 10 kepala daerah memberikan sinyal bahwa dukungan terhadap Jokowi menguat. Makin menguat di sini bisa saja bermakna bahwa elektabilitas Jokowi di Sumbar bisa meningkat dibandingkan Pilpres lalu, sekalipun

masyarakat yang masuk ke dikal masa lalu. Ia bahkan di- dalam "rimba raya" media - kapitalistik".

> Bagaimanapun, kekalahan Jokowi tempo hari di sejumlah daerah ikut dipengaruhi kampanye liar yang menuduhnya komunis, Kristen dan keturunan China. Bahkan untuk Sumbar, dipasangkan dengan Jusuf Kalla, yang notabene urang sumando sekalipun, dianggap tak banyak menambah dukungan kalangan puak ini terhadap Jokowi.

Setelah jadi Presiden, Jokowi menampilkan diri sebagai Presiden bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. la cukup sering berkunjung dan memberikan perhatian besar ke Sumbar dengan membawa program-program yang riil seperti pembangunan kawasan wisata Mandeh, pembangunan kereta bandara, Pesantren Buya Hamka, Pelabuhan Pasaman Barat, jalan tol Padang-Pekanbaru, dan lainnya.

Selama menjadi presiden, Jokowi juga berhasil menepis tuduhan komunis. Kristen, dan anti Islam. Secara keseluruhan, mantan Gubernur Jakarta itu mampu menampilkan diri sebagai pemimpin dengan keunggulan tersendiri, bahkan berbeda dengan tipikal pemimpin Jawa pada umumnya. Di atas semuanya, diferensiasi Jokowi yang menonjol saat ini, karena ia dianggap figur sed-Prhana, merakyat, dan bersih

tetap kalah dari Prabowo yang kini berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Politik Orang Minang

Apapun, perilaku politik orang Minang kontemporer menarik dicermati. Ada perubahan, tetapi juga ada semacam kesinambungan perilaku politik Minang, baik dalam memilih partai maupun mendukung tokoh. Tentu saja, banyak variabel yang mempengaruhi, seperti idiologi, ketokohan, kampanye dan program untuk rakyat.

Secara kepartaian, ada pergeseran pilihan politik orang Minang dari masa ke masa. Di awal kemerdekaan (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1957), hingga Demokrasi Terpimpin (1959-1966), kecenderungan politik Minang adalah partai Islamis. Namun Partai Masyumi yang cukup berjaya di Sumbar kala itu sebenarnya tak hanya ka-

di tengah zaman "demokrasi

Namun politik juga adalah persoalan representasi ketokohan-bukan saja representasi idiologi dan program. Minimalnya figur Minang di pemerintahan saat ini dalam batas tertentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi untuk meningkatkan dukungan etnis ini. Dalam konteks itulah, dukungan terbuka sepuluh kepala daerah di atas plus dukungan tokoh-tokoh informal lainnya, baik di ranah maupun rantau, bisa menambah kekuatan dan kepercayaan diri kubu lokowi-Ma'ruf

Amin'di Sumbat. Sebaliknya, sebagai penantang dan oposisi, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno iidak terlalu terbebani oleh representasi ketokohan daerah. Prabowo sendiri bahkan jarang berkunjung ke Surnbar, namun akseptabilitasnya diyakini tetap tinggi vis-a-vis Jokowi. Sekalipun demikian, pasangan ini tentu akan "bertempur" habis-habisan, termasuk di Sumbar, suatu daerah yang cukup "unik" dalam peta politik Indonesia kon-

Akhirnya, harapan untuk Pilpres dan Pileg, modelmodel kampanye hitam dan kampanye liar bisa dikendalikan, sehingga menghasilkan dialektika demokrasi yang damai, makin dewasa, mencerahkan dan menyejahterakan seluruh warga bangsa. (*)